

**ANALISIS**  
**PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH**  
**NOMOR 41 TAHUN 2007**  
**TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**  
**(Studi pada Setda Kabupaten Manggarai Barat)**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat**  
**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan**



**OLEH**

**PAULUS ALFIAN SUTISNO**

**41109020**

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS KATHOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG**

**2014**



## UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

Jl. Jend. Achmad Yani 50 - 52, Telp. (0380) 833395, Fax. 831194  
Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail : [info@unwira.ac.id](mailto:info@unwira.ac.id)  
Kupang 85225 - Timor - NTT

### BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada Hari ini, *Jumat Tanggal 16 Mei 2014 Jam 10.00* Telah diadakan Ujian Sarjana Program Skripsi, bagi mahasiswa :

Nama : Paulus Alfian Sutisno  
No. Reg. : 411 09 020  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Judul Skripsi :

**"PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41  
TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT  
DAERAH (STUDI PADA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUAPTEN MANGGARAI BARAT".**

Di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri dari :

- 1 Ketua : Drs. Urbanus Ola, M.Si
- 2 Sekretaris : Drs. Mikael Thomas Susu, M.Si
- 3 Penguji Materi I : Apolonaris Gai, S.IP,M.Si
- 4 Penguji Materi II : Veronika I.A. Boro, S.IP,M.Si
- 5 Penguji Materi III : Drs. Urbanus Ola, M.Si
- 6 Pembimbing I : Drs. Urbanus Ola, M.Si
- 7 Pembimbing II : Drs. Mikael Thomas Susu, M.Si

Hasil Ujian diperoleh sebagai berikut :

Nilai yang diperoleh dari Penguji I = 80  
Penguji II = 79  
Penguji III = 82

Lulus dengan Nilai = A./B.D. (DELAPAN PULUH)  
Belum Lulus dan diberikan kesempatan untuk ujian ulang pada :

HARI : ....., TANGGAL : ....., JAM : .....  
Hasil Ujian Ulang = .....

Mengesahkan  
Dekan  
  
DRS. FRANS NYONG, M.SI

Kupang, 16 Mei 2014  
Ketua Tim Penguji,

DRS. URBANUS OLA, M.SI

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISI PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41  
TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PADA  
SETDA KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

**Skripsi ini Telah Disetujui dan Diterima Dengan Baik**

**Kupang, Mei 2014**

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Drs. Urbanus Ola Hurek, M, Si**



**Drs. Mikael T. Susu, M, Si**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Katolik Widya Mandira Kupang**



## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Paulus Alfian Sutisno  
No. Reg : 411 09 020  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis (Skripsi) dengan judul : “Analisis Penerapan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pada Setda Kabupaten Manggarai Barat”

Adalah benar-benar karya sendiri yang dibimbing oleh Drs.Urbanus Ola Hurek. M,Si selaku pembimbing I dan Drs. Mikael T. Susu. M,Si selaku pembimbing II. Apabila dikemudian hari ditemukan penyimpangan, maka saya bersedia dituntut secara hukum.

Kupang, Mei 2014

Mahasiswa

Paulus Alfian Sutisno

411 09 020

## MOTTO

**DALAM TANGAN-NYA  
SELALU ADA JALAN**

**By : PAULUS ALFIAN SUTISNO**

## PERSEMBAHAN

Karya ini Kupersembahkan untuk :

1. Keluargaku tercinta, terbaik dan teristimewa  
Bapa Fabianus Tala dan Mama Tercinta  
Veronika Seot yang selalu mendoakan,  
mendidik, memotivasi, membiayai semua yang  
penulis butuhkan dalam mendukung kesuksesan  
ini.
2. Adik-adik tersayang : Ryani dan Yolana yang  
selalu menjadi motivasi penulis.
3. Keluarga besar bapa dan mama yang tidak  
dapat penulis sebutkan satu persatu namanya  
yang juga punya andil besar dalam kesuksesan  
ini.
4. Almamater Tercinta Universitas Katolik Widya  
Mandira, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmat-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan Pada FISIP Universitas Katholik Widya Mandira Kupang.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak menemui rintangan dan hambatan, namun semua ini dapat diatasi berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan hati yang tulus peneliti ucapkan limpah terima kasih kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Katholik Widya Mandira Kupang P. Yulius Yasinto, SVD, M.Si, M.Sc.
2. Bapak Dekan FISIP, Bapak/Ibu dosen dan semua staf pada Tata Usaha Universitas Katholik Widya Mandira Kupang.
3. Bapak Ketua dan Ibu Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan yang selalu melayani peneliti dan membimbing peneliti dengan baik selama masa kuliah.
4. Bapak Drs.Urbanus Ola Hurek.M,Si selaku pembimbing I dan Bapak Drs.Mikael T. Susu.M,Si selaku pembimbing II yang dengan sabar membimbing peneliti selama penulisan skripsi ini.
5. Bapak Apolonaris Gai, S.IP, M.Si selaku penguji I dan Ibu Veronika I.A. Boro, S.IP, M.Si selaku penguji II yang telah menyempatkan waktu dan bersedia menguji penulis guna mendapatkan gelar sarjana.

6. Bapak/Ibu responden dan segenap Aparatur Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan data kepada penulis selama penelitian.
7. Rekan-rekan seperjuangan Angkatan 2009 Jurusan Ilmu Pemerintahan Rion, Rio, Rian, Ira, Mario, Bocha, Oan, Arsha, Amos, Andry, Bravo, Hen, Ger, Debhy, Jeri, Rafly, Putra, Epril, Ximenes dan Iban yang juga punya kontribusi besar dalam mendukung penyelesaian skripsi ini dan kenangan yang tak terlupakan karena telah berjuang dan mengenal kalian semua, sampai kapanpun tetap penulis ingat akan pertemuan 10 semester ini.
8. Kekasih tercinta Maria Oktavia yang selalu memberikan dukungan moril dan do'a kepada penulis.
9. Kakak, adik dan teman-teman seperjuangan Angkatan Caritas PMKRI St.Fransiskus Xaverius Cabang Kupang.
10. Kakak, adik dan teman-teman IMAPEL Kupang.

Segala budi baik dari berbagai pihak penulis mungkin tidak mampu membalasnya namun hanyalah doa kiranyanya Tuhan Yang Maha Kuasa dapat membalas semua budi baik yang telah kalian persembahkan bagi penulis.



Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini belum mencapai kesempurnaan, untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun, sangat diharapkan oleh penulis demi kesempurnaan skripsi ini.

Kupang, Mei 2014

PENULIS

## DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Berita Acara Ujian Skripsi	
Halaman Pengesahan.....	i
Pernyataan Orisinalitas.....	ii
Motto.....	iii
Persembahan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi .....	vi
Daftar Tabel.....	xi
Lampiran .....	xii
Abstrak.....	xiii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9

## **BAB II TINJAUAN TEORITIS**

A. Tinjauan Pustaka.....	10
B. Penataan Kelembagaan.....	13
C. Prinsip penataan kelembagaan.....	16

## **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Penentuan Metode Penelitian .....	20
B. Populasi, sampel dan responden penelitian	
1. Populasi.....	20
2. Sampel.....	20
3. Responden.....	21
C. Operasionalisasi Variabel .....	21
D. Jenis dan Sumber Data.....	22
E. Teknik Pengumpulan Data .....	23
F. Teknik Pengolahan data .....	23
G. Teknik Analisa Data .....	23

## **BAB IV DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	25
B. Visi Misi Kabupaten Manggarai Barat.....	25
C. Gambaran Umum Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan PP Nomor 41 tahun 2007.....	27

## **BAB V ANALISIS HASIL PENELITIAN**

A. Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang Ramping.....	37
1. Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang Sempel Struktur.....	38

2. Sinergisitas Fungsi Perangkat Daerah.....	42
B. Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang Efisien.....	44
1. Pembentukan SKPD berdasarkan kapasitas daerah (Keuangan, Jumlah Luas Wilayah dan Penduduk).....	45
2. Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan Urusan Daerah.....	52

## **BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	67

### **Daftar Pustaka**

### **Lampiran-lampiran**

### **Bukti Dokumentasi**

## **DAFTAR TABEL**

- Tabel 1 : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat 2012
- Tabel 2 : Nilai Variabel Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2013
- Tabel 3 : Besaran Organisasi Perangkat Daerah Kab. Manggarai Barat
- Tabel 4 : Banyaknya Pegawai Pemerintah menurut Klasifikasi Eselon Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2013
- Tabel 5 : Jumlah dan Rasio Jabatan Struktural Pegawai Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2013
- Tabel 6 : Kondisi Organisasi Kabupaten Manggarai barat 2014
- Tabel 7 : Besaran Organisasi Perangkat Daerah Kab. Manggarai Barat
- Tabel 8 : Perbandingan Besaran Organisasi Perda No.6 Tahun 2008 dengan Perda No.2 Tahun 2012
- Tabel 9 : Gambaran Organisasi Perangkat Daerah Kab. Manggarai Barat
- Tabel 10 : Tabulasi Perumpunan dan Penambahan SKPD Kabupaten Manggarai Barat
- Tabel 11 : Simulasi Urusan Kehutanan Berdasarkan PP No.8 Tahun 2003
- Tabel 12 : Realisasi Belanja Langsung Per SKPD Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2013

## **LAMPIRAN**

- Lampiran 1 :Pedoman wawancara
- Lampiran 2 :Bukti Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 3 :Surat-surat penelitian
- Lampiran 4 : Organisasi dan Personalia
- Lampiran 5 : Jadwal dan Biaya Penelitian
- Lampiran 6 : Lembaran konsultasi

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pada Kabupaten Manggarai Barat”. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah dampak Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat ? Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mendeskripsikan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah terhadap penataan kelembagaan pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dan 2) Menganalisis faktor yang berpengaruh terhadap penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, supaya tercapainya suatu daerah otonomi yang efisien, efektif dan rasional. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah bupati atau wakil bupati, Anggota DPRD, pimpinan dan staf pada dinas, badan, dan lembaga teknis daerah terkait di Kabupaten Manggarai Barat. Dalam penelitian ini, sampel ditentukan dengan teknik penarikan *purposive sampling*. Variabel utama dalam penelitian ini adalah penataan organisasi perangkat daerah. Terdapat 2 (dua) sub variabel organisasi perangkat daerah yaitu : 1) Penataan organisasi berbasis organisasi ramping dengan indikatornya (a) Sempel struktur dan (b) Sinergi fungsi. 2) Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang efisien dengan indikatornya (a) Pembentukan SKPD berdasarkan kapasitas daerah dan (b) Pembentukan SKPD berdasarkan urusan daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penataan organisasi perangkat daerah Kabupaten Manggarai Barat telah menerapkan pola besaran organisasi maksimal dimana pola maksimal yang dimaksudkan adalah kondisi besaran organisasi pada daerah telah sesuai dengan ketentuan PP Nomor 41 Tahun 2007. Daerah kabupaten Manggarai barat yang menerapkan pola maksimal ini dalam pelaksanaan pemerintahan telah mengsinergikan fungsi dengan baik dari tiap-tiap organisasi hal ini dapat saling menunjang tugas dan fungsi organisasi. Pembentukan SKPD berdasarkan kapasitas daerah dan urusan daerah diukur dari ketiga variabel yaitu APBD, Jumlah penduduk, dan luas wilayah, adapun pembentukan organisasi pemerintah di daerah pada dasarnya berbasis kapasitas daerah. urusan yang diserahkan kepada daerah lewat PP No. 38 tahun 2007 Tentang pembagian urusan, terdapat 34 urusan pada pemerintah daerah yang dijabarkan lewat Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah yang kemudian daerah membagi urusan tersebut menjadi, 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan.

Dari hasil penelitian ini ditarik kesimpulan bahwa, penerapan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menyebabkan terjadinya penggemukan struktur bila dibandingkan dengan besaran organisasi perangkat daerah tahun lalu, akan tetapi besarnya struktur pada daerah tetap memperlihatkan kesinergian fungsi dari tiap organisasi perangkat daerahnya. Pembentukan SKPD berdasarkan kapasitas daerah dan urusan daerah menyebabkan pembentukan organisasi yang disesuaikan dengan kondisi daerah dan berusaha memaksimalkan tupoksi setiap perangkat daerah guna mendatangkan PAD yang besar dalam pencapaian target PAD setiap organisasi.

Saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat agar merampingkan kembali organisasi guna terwujudnya pelaksanaan birokrasi dengan mendepankan fungsi dengan menempatkan posisi aparatur yang professional dibidangnya. Kesinergian fungsi harus tetap dipertahankan pemerintah daerah. Pembentukan SKPD pada daerah tupoksinya harus dapat dioptimalisasi guna mendukung otonomi daerah yang mandiri.